

ANALISIS PEMBINAAN PRESTASI PEMUDA TERHADAP AKTIVITAS PENCAK SILAT PSHT DI KABUPATEN BANYUWANGI

Ajeng Yulin Kusuma

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNTAG, Banyuwangi

E-mail: ajengyulin17@gmail.com

Abstrac: Analist For Fostering Youth Achievements in Martial Arts Activities in Banyuwangi Distric Martial arts is an ancestral cultural heritage that must be preserved and preserved. There are various kinds of martial arts colleges in Banyuwangi, one of which is PSHT. Ther is also the purpose of martial arts PSHT, which is to educate virtuous people to know right and wrong and devote to God Almighty, which means that besides teaching about martial arts, PSHT also teaches about moral education. This is very necessary as a moral formation for young people. But along with the development of the times there are some young people who do negative actions that can harm themselves and others and the surrounding environment such actions are commonly reffered to as youth paathology. Therefore ways to prevent the occurence of youth pathology can be directed to follow the PSHT martial arts. Because martial arts has been consideret good, the government supports these activities by making martial arts as one of the sports contested. So that the goverment held an event with a target specifically for youth. The objective to be achieved are to print superior, productive, and accomplished youth.

Keywords: PSHT, Achievement, Banyuwangi.

Analisis Pembinaan Prestasi Pemuda Terhadap Aktivitas PSHT di Kabupaten Banyuwangi

Pencak silat merupakan warisan budaya leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Terdapat berbagai macam perguruan pencak silat yang ada di Banyuwangi salah satunya yaitu PSHT. Adapun tujuan dari pencak silat PSHT yaitu mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang artinya selain mengajarkan tentang ilmu bela diri PSHT juga mengajarkan tentang pendidikan moral. Hal tersebut sangat diperlukan sebagai pembentukan moral bagi para pemuda. Namun seiring berkembangnya zaman terdapat beberapa pemuda yang melakukan tindakan negatif yang dapat merugikan dirinya dan orang lain serta lingkungan sekitarnya tindakan tersebut biasa disebut sebagai patologi pemuda. Oleh karena itu cara untuk mencegah terjadinya patologi pemuda dapat diarahkan untuk mengikuti pencak silat PSHT. Karena pencak silat sudah dinilai baik maka pemerintah mendukung kegiatan tersebut dengan menjadikan pencak silat sebagai salah satu olahraga yang dipertandingkan. Sehingga pemerintah mengadakan *event* dengan sasaran dikhususkan untuk pemuda. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu mencetak pemuda yang unggul, produktif, dan berprestasi.

Kata kunci: PSHT, Prestasi, Banyuwangi

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kaya budaya. Lahirnya budaya dalam suatu masyarakat dapat menunjukkan ciri khas daerah tersebut. Salah I (satu) budaya warisan leluhur yang melekat dalam diri masyarakat hingga saat ini yaitu pencak silat.

Untuk melestarikan warisan leluhur, yaitu pencak silat, terdapat anggota masyarakat yang mendirikan perguruan pencak silat dalam berbagai aliran. Pencak silat makin merambah luas pada saat

diadakannya pertandingan pencak silat, yang selanjutnya pertandingan tersebut dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pencak silat tidak hanya untuk melestarikan budaya dan sebagai bentuk pertahanan diri, akan tetapi bermanfaat bagi pemuda yang ingin memperoleh prestasi.

Pemuda adalah harapan bangsa. Di tangan mereka terletak baik buruknya suatu bangsa. Ketika pemudanya baik, maka baiklah bangsa itu. Sebaliknya bila pemudanya berakhlak buruk, maka bangsa

tersebut tinggal menunggu datangnya kehancuran.

Menurut Mulyana (2011, h.12), “pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis, artinya bisa memiliki karakter yang bergejolak, optimis dan belum mampu mengendalikan emosi yang stabil.”

Berdasarkan teori tersebut maka dapat diterjemahkan bahwa pemuda merupakan aktor kunci dalam sebagian proses perubahan ekonomi dan sosial. Dalam perspektif logika neoliberal memandang pemuda sebagai modal manusia. Artinya pemuda dilihat dapat berpotensi menjadi sumber daya yang memiliki pemikiran kreatif, inovatif, idealis dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta memiliki obsesi yang tinggi untuk mencapai tujuannya. Atas dasar teori tersebut maka pemuda selalu dianggap sebagai tonggak suatu bangsa.

Selain daripada itu pemuda dipersepsikan sebagai transisi, identitas, aksi praktik budaya dan sebagai pencipta budaya. Oleh karenanya bagian utama dari sejumlah ide kunci tentang dimensi-dimensi kepemudaan meliputi: sebagai generasi hubungan dengan orang dewasa, hubungan dengan perubahan sosial atau politik, dan hubungan dengan negara.

Karena pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis, maka perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi pemuda yang tidak memiliki kesadaran akan hal tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan negatif. Disamping itu, masalah yang mendominasi dari rasa tidak sadar para pemuda dikarenakan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang bersifat patologi, seperti: minum-minuman keras, sex bebas, perkelahian, hingga bermain narkoba.

Menurut Kartono (2003, h.67):

“Akibat pemakaian bahan narkotik ialah timbulnya ketergantungan psikis dan ketergantungan fisik. Sedangkan akibat lebih jauh dari penggunaan bahan narkotika ialah; timbulnya banyak masalah sosial yang serius, antara lain berupa prostitusi,

meningkatnya kriminalitas, kenakalan remaja, gerakan-gerakan ekstrim, keresahan sosial dan lain-lain.”

Dari asumsi tersebut, dapat dianalogikan bahwa kejadian tersebut merugikan dirinya, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan strategi-strategi terhadap pembatasan menghadapi perilaku-perilaku berisiko, kenakalan dan dampak budaya asing, guna melindungi pemuda dari risiko yang ditimbulkannya.

Pemerintah memiliki peran serta tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh para pemuda, baik itu berdampak negatif dan positif. Untuk menangani kenakalan remaja, pemerintah berupaya untuk melakukan program pembangunan pemuda dengan cara menerapkan strategi pembinaan pembangunan pemuda.

Menurut Galtung (2007, h.3):

“Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.”

Pendapat Galtung tersebut dapat diasumsikan bahwa pembangunan pemuda merupakan bagian dari cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber insani bagi pembangunan. Oleh karenanya pembangunan pemuda menjadi program penting dan sejalan dengan tuntutan reformasi dan globalisasi. Oleh karenanya, salah satu pembinaan pembangunan generasi muda yang tangguh dan cerdas dapat dilakukan melalui pendidikan.

Tinjauan Pustaka

1. Aspek Kebijakan

Pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, melainkan lebih dari itu yaitu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal. Kebijakan publik yang diformulasi oleh daerah secara luas memberikan warna-warna tertentu pada setiap daerah.

Definisi tentang kebijakan publik dari Friedrich (2008, h.7):

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Terkait dengan kebijakan yang merupakan bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Artinya bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud serta merupakan bagian penting dari definisi kebijakan yang harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan UU Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tujuan semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengatasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah. Sehingga dalam mengimplementasikan kegiatan pemerintah daerah harus terciptanya formulasi atau perumusan kebijakan.

2. Aspek Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan atau interaksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Terdapat beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi Weber mengartikan “masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang sudah dominan pada warganya.”

Kehidupan suatu masyarakat adalah sebuah sistem sosial dimana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi satu

kesatuan yang terpadu. Adapun Soekanto (2014.hlm39) mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah: manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu, bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama, menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan, merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.

Manusia selalu memiliki rasa untuk hidup berkelompok akibat dari keadaan lingkungan yang selalu berubah atau dinamis. Perubahan-perubahan tersebut memaksa manusia memakai akal, kreativitas, perasaan, serta daya tahannya. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka tidak dapat sendiri dalam sebuah masyarakat, akibatnya timbullah timbal balik atau interaksi antar manusia, dengan kriteria-kriteria diantaranya: harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung, ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pengamat.

a. Kepemudaan

Pemuda adalah golongan manusia-manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Dalam diri pemuda terdapat berbagai macam sisi positif yang akan menguntungkan dirinya serta orang yang berada di sekitarnya. Sisi positif tersebut berupa bakat dan kreativitas.

Pendidikan adalah salah satu unsur penting dalam mengembangkan suatu kreativitas. Karena, dengan pengembangan kreativitas atau daya cipta memungkinkan munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta dalam semua bidang usaha lainnya. Sedangkan bakat merupakan suatu yang menyatakan tentang kemampuan umum diatas rata-rata, kreativitas diatas rata-rata, dan peningkatan diri terhadap tugas yang cukup tinggi. Dengan melakukan pendidikan dan

pengembangan bakat akan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu, tujuan dari pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat.

Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah sebagai makhluk moral, makhluk sosial. Artinya beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi. Melalui proses sosialisasi, seseorang menjadi tahu bagaimana harus bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Dalam hal ini sosialisasi diartikan sebagai proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir dalam suatu kelompok agar memiliki peran serta berfungsi dalam kelompok.

b. Patologi Kepemudaan

Patologi sosial patologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phatos*, yang berarti penderitaan, penyakit. Menurut Kartono (2003, h.13):

“Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.”

Hal tersebut sering terjadi pada suatu kelompok masyarakat, terutama pada pemudanya. Salah satu penyebab terjadinya patologi pada pemuda yaitu tidak adanya kesadaran diri bahwa mereka memiliki memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan oleh berberapa faktor, yaitu: *pertama*, *defisien* atau defek moral adalah kondisi individu yang hidupnya selalu melakukan kejahatan, dan bertingkah laku anti sosial namun tanpa penyimpangan atau gangguan organis pada fungsi inteletiknya, hanya saja inteletiknya tidak berfungsi, sehingga terjadi kebekuan moral yang kronis.

Sikap orang-orang yang defek mentalnya ialah: dingin, beku, tanpa afeksi.

Emosinya steril terhadap sesama manusia; munafik, jahat, egois, tidak menghargai orang lain. tingkah lakunya selalu salah dan jahat; sering melakukan kekerasan, kejahatan, penyerangan serta selalu melanggar hukum, norma dan standar sosial. Kelemahannya terutama ialah; ketidakmampuannya untuk memahami, mengendalikan dan melakukan regulasi terhadap emosi-emosi, implus-implus dan tingkah laku sendiri. Mereka juga tidak bisa dipercaya. Kualitas mental mereka pada umumnya rendah. Pembentukan egonya sangat lemah.

Kedua, Anak-anak bubrah adalah anak-anak dengan perkembangan pribadi yang regresif serta kerusakan pada fungsi inteletik, sehingga interrelasi kemanusiannya menjadi miskin, beku, steril tanpa afeksi; disertai penolakan terhadap super ego dan hati nurani sendiri, hingga muncul kebekuan moral. Mereka digolongkan dalam kelompok defek moral. Orientasi sosialnya rusak. Banyak dari mereka jadi autistik dan psikotis, dengan retardasi mental yang berat. Mereka mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, dan sifatnya sangat egoistis. Pada umumnya mereka selalu gelisah, dengan tindakan yang meledak-ledak tanpa kasihan tanpa ampun, dan tidak mengenal belas kasihan. Hatinya beku membatu, tanpa afeksi sama sekali.

Faktor penting yang menyebabkan anak bubrah yaitu, terpisahnya mereka dari orang tua pada usia kurang dari 3 (tiga) tahun, khususnya pisah dengan ibunya biasanya hal tersebut terjadi pada anak-anak haram tanpa mengetahui ayahnya; anak-anak yang dipelihara dari rumah sakit, rumah yatim piatu dan panti-panti penitipan, dan tidak pernah merasakan kasih sayang, bahkan mereka mendapat perlakuan yang keras dan kejam, sehingga muncul rasa-rasa dendam, agresi, kebekuan emosional dan interelasi sosial yang sangat miskin.

Ketiga, *Juvenile delinquency* atau juvenilis memiliki arti muda, bersifat kemudaan. Sedangkan *delinquency* berasal dari delinquere yang memiliki arti jahat, durjana, pelanggar, nakal. Jadi, *juvenile delinquency* adalah anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivir untuk

mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya.

Mereka disebut juga sebagai pemuda-pemuda berandalan, atau pemuda aspalan yang selalu berkeliaran di jalan-jalan aspalan. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Mental dan kemauannya menjadi lemah, hingga implus-implus, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi. Tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Fungsi-fungsi psikisnya tidak bisa diintegrasikan, hingga kepribadiannya menjadi khaotis dan menjurus pada psikosis.

Anak-anak muda deliquent sering dihinggapi rasa berbeda, rasa inferior, frustrasi, dan dendam. Maka untuk mengkompensasikan perasaan-perasaan minder mereka melakukan perbuatan-perbuatan kebesaran, kekerasan dan kriminal, menteror lingkungan, bersikap tiranik, agresif dan destruktif, merusak apa saja. Semua itu dilakukan dengan maksud: mempertahankan harga dirinya, dan untuk membeli status sosial serta prestige sosial, untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungannya.

3. Aspek Pencak Silat

Pencak silat terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu pencak dan silat. Dalam KBBI, pencak memiliki arti permainan atau keahlian untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak dan sebagainya. Sedangkan silat berarti pencak atau bela diri, bersilat atau bertengkar. Dari pengertian tersebut secara singkat pencak silat dapat diartikan sebagai suatu keahlian bela diri yang menggunakan kepandaian menangkis, mengelak, menyerang dan sebagainya yang digunakan dalam bersilat atau bertengkar. Koesoepangat, seorang tokoh sentral Perguruan Setia Hati Terate, berpendapat bahwa pengertian kata pencak adalah bela diri tanpa lawan. Sedangkan arti dari silat adalah gerakan bela diri yang tidak bisa dipertandingkan.

Dari definisi tokoh-tokoh tersebut, pencak silat dapat diartikan sebagai gerak serang bela yang teratur menurut sistem atau waktu yang dapat berupa tari dan berirama dengan peraturan dan digunakan dalam belajar serta latihan atau pertunjukan.

Sedangkan silat adalah gerak serang bela yang erat hubungannya dengan aspek rohani yang suci murni, tidak bisa dipertandingkan dan digunakan guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama.

Definisi dari pencak silat tersebut jika digabungkan menjadi kata pencak silat yang utuh dapat berarti, seni bela diri dengan gerakan efektif dan terkendali berasaskan aspek rohani yang suci murni yang digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan diri ataupun kesejahteraan bersama. Dalam pembinaannya, terdapat 4 (empat) aspek utama dalam seni bela diri pencak silat, yaitu: *pertama*, aspek bela diri merupakan salah satu aspek pencak silat yang cenderung menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat.

Walaupun ada bermacam aliran pencak silat di Indonesia, namun dalam setiap gerakannya memiliki beberapa ciri yang serupa seperti gerakan yang halus, lentur, dan lemas, tidak diperlukan banyak ruangan, tenaga digunakan pada saat tertentu, tenaga lain seringkali dimanfaatkan, banyak variasi langkah, gerakan yang digunakan sering gerakan mengelak, gerakan kaki, angkatan, dan tendangan tidak terlalu tinggi, sikap tangan selalu dekat dengan badan, dan pernapasan yang wajar serta sedikit mengeluarkan suara..

Kedua, aspek olahraga merupakan salah satu aspek pencak silat meliputi, pertandingan, kompetisi dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk pertandingan tunggal, ganda, maupun regu.

Ketiga, aspek seni dan budaya merupakan salah satu aspek pencak silat yang memiliki arti bahwa pencak silat merupakan bagian dari seni dan budaya. Sebagai kesenian, pencak silat dipertunjukkan dengan diiringi musik, gamelan, maupun rebana. Istilah pencak juga pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencak silat diiringi dengan busana dan musik tradisional. Jika pencak silat sebagai aspek seni bela diri atau olahraga menekankan pada efisien gerak dan kegunaannya, maka pencak silat sebagai seni dan budaya menekankan pada keindahan gerak.

Keempat, aspek mental spiritual. Dalam aspek ini, pencak silat tidak hanya

menekankan pada kekuatan aspek fisik tetapi juga menguasai seni bela diri pencak silat dapat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Membina sportivitas dan karakter ksatria dalam diri juga melatih kepercayaan diri dan mental yang kuat.

4. Konsep Implementasi berdasarkan Perbub Kabupaten Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016

Peraturan daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

Sehingga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DISPORA Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati, maka keluarlah kebijakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi yang memiliki tujuan untuk melaksanakan pembinaan, pendidikan, pengembangan sesuai dengan tupoksi DISPORA.

Terkait Perbub Kabupaten Banyuwangi tersebut, peneliti mengambil titik fokus pada bidang olahraga yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, organisasi olahraga dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. Dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan daerah tersebut terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan sesuai dengan konsep yang telah disampaikan oleh Edward

III. Hal tersebut menjadi upaya wajib yang harus dilakukan agar terciptanya kondisi serta situasi yang kondusif, sehingga aktifitas yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dapat terkendali dengan baik.

Dalam rangka menguraikan konsep implementasi kebijakan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dan Fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga peneliti mengurai dengan menggunakan model pendekatan Edward III yang memiliki 4 (empat) variabel, yaitu: komunikasi, sumberdaya, sikap atau perilaku, dan struktur birokrasi.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2007, h.11):

“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Data-data dalam penelitian kualitatif tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumentasi pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi lainnya.

Sesuai yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2009, h.130):

“Pendekatan kualitatif deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.”

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui deskripsi atau gambaran tentang Pembinaan Prestasi Pemuda Terhadap Aktivitas Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten Banyuwangi.

2. Fokus Penelitian

Kegunaan dari fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dan bidang kajian penelitian. Hal tersebut dikarenakan fokus penelitian memiliki peranan yang penting dalam membimbing dan memberi arah dalam proses pengumpulan data-data yang relevan dan yang diperlukan. Dengan kata lain dapat dijadikan sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian.

Oleh karena itu dalam penelitian diperlukan adanya fokus penelitian, adapun fokus penelitian bertujuan untuk:

- a. Membatasi studi atau akan membatasi bidang kajian dan permasalahan.
- b. Untuk menentukan kriteria-kriteria dalam memasukkan dan mengeluarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Artinya, dengan melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan peneliti akan tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik namun tidak relevan.

Dengan dasar rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, maka fokus penelitian yaitu bagaimana Pembinaan Prestasi Pemuda Terhadap Aktivitas Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten Banyuwangi. Dengan uraian fokus penelitian pendekatan teori implementasi kebijakan George Edward III, yang melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses dinamis, dikarenakan terdapat beberapa faktor yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor tersebut yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, peneliti menetapkan lokasi penelitian di daerah Kabupaten Banyuwangi dan waktu penelitian sejak judul diajukan yaitu bulan November dan turun ke lapangan dimulai pada bulan Februari 2019.

Adapun maksud peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut yaitu lebih efisiensi waktu dan menghemat biaya dikarenakan peneliti lahir dan tinggal di

daerah Banyuwangi, selain itu peneliti ingin mengetahui strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan bakat ataupun dalam mencapai prestasi di kalangan pemuda ataupun pelajar.

4. Teknik Penentuan Informan

Idrus (2009, h.91) mendefinisikan, “informan sebagai orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.”

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian harus berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan. Sehingga pemilihan informan-informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Supriadi, Selaku Sekretaris DISPORA Kabupaten Banyuwangi.
- b. Muhammad Alfin Kurniawan, selaku Kepala Bidang Olahraga DISPORA Kabupaten Banyuwangi.
- c. Hidayaturrahman, selaku Sekretaris IPSI Kabupaten Banyuwangi.
- d. Sudarko selaku, Ketua PSHT Cabang Banyuwangi.
- e. Suci Hatono, selaku Sekretaris PSHT Cabang Banyuwangi
- f. Imam Solid Ariyanto, selaku pelatih kategori tanding dan seni PSHT Cabang Banyuwangi.
- g. Marsya Dwi, salah satu atlet kategori tanding.
- h. Fingga Ayu Maskanah, salah satu atlet kategori seni.
- i. Dwi Phury selaku salah satu tokoh Masyarakat.
- j. Herman Dwi Prabowo, Selaku Waka Kesiswaan SMK NU Mamba'ul Huda

5. Definisi Operasional

Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan, agar tidak adanya kesalahan, maka peneliti memaparkan definisi operasional untuk memperoleh makna yang

sama dalam mempresepsikan istilah dalam penelitian ini yaitu, pencak silat sebagai seni bela diri dan juga merupakan warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan. Oleh karena itu pemerintah mengambil strategi dengan menjadikan pencak silat sebagai salah satu alat yang dipertandingkan untuk mendapatkan prestasi. Dengan cara seperti itu akan menambah daya tarik dan minat para pemuda dalam melestarikan budaya bangsa. Selain itu dapat mengalihkan perhatian pemuda untuk melakukan suatu tindakan yang lebih produktif sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu tindakan negatif disebabkan oleh golongan pemuda.

Untuk mengukur sejauh mana proses implementasi telah dilaksanakan dalam penelitian ini, peneliti menentukan definisi operasional sebagai berikut:

- a. Komunikasi: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.
- b. Sumber Daya Pendukung: Staf, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas.
- c. Disposisi: Sikap, dan Kecenderungan.
- d. Struktur Birokrasi: SOP Pelaksana, dan Fragmentasi Pelaksana.

6. Metode Pengumpulan Data

Bugin (2003, h.42) mengemukakan bahwa “metode pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliabe*”.

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahuinya sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan sepihak berhadapan muka, dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat 3 (tiga) jenis pengelompokan dalam pelaksanaan wawancara, antara lain:

wawancara terpimpin, wawancara bebas adalah pewawancara bebas, wawancara bebas terpimpin. Peneliti mengambil jenis wawancara kedua yaitu wawancara bebas terpimpin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang.

d. Triangulasi (gabungan)

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Triangulasi juga diartikan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut.

7. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (2014, h.20). Selanjutnya didalam model tersebut Miles dan Huberman mengutarakan bahwa didalam model analisis interaktif terdapat 3 (tiga) aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh peneliti, yaitu: *pertama*, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Kedua, penyajian data merupakan hal untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu di dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan kesimpulan.

Ketiga, penarikan kesimpulan, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan verifikasi secara terus menerus, sepanjang proses berlangsung, akan menarik suatu kesimpulan. Proses yang dimaksud adalah proses sejak

awal seorang peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

8. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010, h.55) ada 4 (empat), yaitu: derajat kepercayaan (*creadibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*).

Pembahasan

1. PSHT

Dengan diawali pembukaan tempat latihan oleh Prasetyo pada tahun 1986 PSHT berkembang di daerah Banyuwangi dengan Cabang: Setia Hati Terate Cabang Kalibaru Banyuwangi. Selang 2 (dua) tahun angkatan pertama berhasil disyahkan dengan pengesahan ikut Cabang Jember. Untuk lebih memperluas perkembangan PSHT di Daerah Banyuwangi Prasetyo mencari saudara-saudara warga SHT yang berdomisili di Banyuwangi, sehingga pada tahun 1990 didirikan Ranting Banyuwangi dengan tempat latihan PJR Banyuwangi. Dikarenakan PSHT Kabupaten Banyuwangi sudah tersebar di beberapa kecamatan, maka saudara-saudara sepakat mendirikan PSHT Cabang Bayuwangi serta mendirikan padepokan yang bertempat di daerah Cluring dikarenakan tempat tersebut berada di tengah-tengah Kabupaten Banyuwangi.

2. IPSI

IPSI merupakan induk organisasi resmi pencak silat di Indonesia yang berada di bawah naungan KONI. Pencak silat di Banyuwangi merupakan ilmu bela diri yang sudah populer dengan berbagai macam aliran atau perguruan. Dari berbagai macam aliran tersebut terdapat ciri khas masing-masing yang menggambarkan keunikan dari aliran pencak silat tersebut.

Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pencak silat di Banyuwangi sudah mendarah daging dengan masyarakat. Terbukti dengan terdapatnya 23 (dua puluh tiga) perguruan pencak silat secara resmi dan masih banyak lagi yang belum terdaftar dan yang mendaftar secara resmi merupakan perguruan yang aktif

mengirimkan atletnya untuk mengikuti pertandingan. Sehingga untuk menjadikan pencak silat lebih produktif dan dapat melahirkan atlet-atlet yang berkualitas pihak IPSI mengagendakan beberapa kegiatan.

Sehingga IPSI Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa program, yaitu: *pertama*, pelatihan pelatih. Tujuan diadakannya pelatihan pelatih yaitu untuk memberikan arahan atau pelatihan kepada pelatih terkait tentang kepemimpinan dan falsafah kepelatihan, teori dan metodologi latihan, fisiologi olahraga, psikologi olahraga, pertumbuhan dan perkembangan gerak, teori dan praktek kondisi fisik umum, perencanaan program latihan dasar, tes dan kepengukuran olahraga. *Kedua*, pelatihan wasit juri. Perwasit-jurian sebagai pelaksana dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pertandingan harus benar-benar mewujudkan bentuk-bentuk pelaksanaan pertandingan sesuai dengan dasar dan tujuan dari pertandingan itu sendiri.

Ketiga, mengadakan *event* pencak silat. agenda tahunan yang sudah dipatenkan oleh IPSI Banyuwangi yaitu KEJURKAB dengan diikuti berbagai macam perguruan yang sudah terdaftar secara resmi. Adapun tujuan mengadakan *event* tersebut yaitu penjaringan atlet-atlet yang juara.

Dari wawancara tersebut terdapat beberapa penjelasan, yaitu pemusatan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian memiliki maksud bahwa: pemusatan latihan berjenjang yang dilakukan setiap hari sabtu dan minggu yang dilakukan selama beberapa bulan bertujuan untuk melatih kebiasaan dan kondisi fisik serta pemahaman materi terkait teknik dalam bertanding secara bertahap.

3. Upaya PSHT Dalam Mencetak Atlet Berkualitas

PSHT merupakan salah satu organisasi pencak silat yang tergabung dalam IPSI dan memiliki nama dikalangan masyarakat terkait prestasi yang dicapai oleh para atlet. Untuk itu terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh PSHT dalam meningkatkan dan mencetak atlet yang berkualitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan PSHT untuk meningkatkan kualitas atlet, yaitu: *pertama*,

pelatihan pelatih yaitu ditujukan untuk para pelatih PSHT yang memfokuskan atletnya untuk mengikuti kejuaraan pencak silat. oleh karena itu PSHT Cabang Banyuwangi membuat program tahunan berupa pelatihan pelatih atau biasa disebut sebagai penataran pelatih. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan SDM para pelatih terkait tentang pengetahuan manajemen organisasi dan administrasi latihan serta kemampuan teknis kepelatihan.

Adapun tema yang dibahas yaitu: Pedoman Teknik dan Administrasi Pelatih Ekstrakurikuler Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate. Pembahasan tema tersebut disebabkan karena perbedaan pandangan antara pencak silat ajaran dan prestasi yang dibawa ke ranah latihan, kemampuan pelatih dalam menangani ekstrakurikuler masih kurang, prioritas prestasi yang diinginkan lembaga pendidikan kurang dilaksanakan

Oleh karena itu sesuai dengan pembahasan tersebut dapat diketahui tujuan utama PSHT Cabang Banyuwangi mengupayakan pelatih yang berada di lingkup sekolah untuk mengikuti penataran pelatih yaitu untuk lebih mengenalkan PSHT kepada sekolah dengan memanfaatkan ekstrakurikuler sebagai pembentukan prestasi yang berbasis olahraga berupa pencak silat. Sehingga terdapat beberapa fakta terkait tentang pelatihan ekstrakurikuler yang sudah diterapkan di lingkup sekolah yaitu: telah diterima di banyak lingkungan sekolah negeri maupun swasta, selain itu terdapat beberapa sekolah menginginkan prestasi dari ekstra kurikuler pencak silat. Sesuai dengan fakta tersebut menunjukkan bahwa ekstrakurikuler di sekolah telah mendapat dukungan.

Kedua, Latihan Rutin dan Terjadwal merupakan salah satu langkah yang wajib dilakukan oleh atlet. Setelah para pelatih mendapatkan pengajaran terkait pembentukan atlet berkualitas dengan jalan mengikuti program penataran pelatih maka penerapannya dengan melakukan latihan rutin dan terjadwal. Salah satu latihan rutin yang dilakukan oleh beberapa atlet PSHT yaitu: *weight lifting* atau berlatih beban.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa latihan rutin merupakan unsur terpenting dalam

menciptakan atau mencetak atlet yang berkualitas..

Beberapa latihan yang mereka terapkan yaitu latihan beban. Adapun tujuan dari berlatih beban, diantaranya: pertama, *mescular stength* yaitu kemampuan otot untuk mencapai kekuatan maksimal. *Kedua*, *mescular endurance* yaitu kemampuan otot untuk melakukan kontraksi berulang ulang selama periode waktu yang telah ditentukan hingga mencapai lelah. *Ketiga*, *hypertrophy* yaitu fase dimana meningkatkan jumlah protein dalam sel otot yang bertujuan untuk perbaikan sel. *Keempat*, *power* yaitu jumlah pekerjaan otot yang dicapai selama periode waktu tertentu.

Dengan menerapkan sistem latihan tersebut terdapat 6 (enam) manfaat yang diperoleh, yaitu: *pertama*, berfungsi untuk mengkontraksikan otot. *Kedua*, berfungsi untuk melatih kekuatan. *Ketiga*, meningkatkan metabolisme. *Keempat*, menambah masa otot. *Kelima*, berfungsi untuk meningkatkan kepadatan tulang. *Keenam*, berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dalam sistem gerak dan koordinasi *neoromuscular*.

Ketiga, *event* PSHT. Merupakan salah satu kesempatan untuk para atlet dalam mengevaluasi kemampuannya. Oleh karena itu banyak sekali diadakan pertandingan pencak silat baik untuk tingkat anak-anak, remaja ataupun dewasa. Hal tersebut merupakan sinyal yang positif bagi para pesilat karena sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan diri, selain itu juga termasuk jalan untuk memperoleh prestasi. Dengan pertandingan dapat digunakan untuk memperoleh bibit-bibit unggul, semakin banyak mengikuti pertandingan semakin banyak pengalaman yang didapatkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa PSHT Cabang Banyuwangi memiliki inisiatif terkait tentang pencarian bibit-bibit unggul dengan cara mengadakan program pertandingan tahunan PSHT yang dinamakan Krida Siswa. *Event* tahunan yang diadakan khusus untuk para siswa PSHT. Dari pertandingan tersebut pihak PSHT Cabang Banyuwangi memperhatikan serta melakukan seleksi terhadap peserta yang mendapatkan juara.

Dengan cara tersebut akan lebih memudahkan dalam pembinaan terkait mencetak atlet yang berkualitas.

Sehubungan dengan *event* pencak silat tersebut terdapat dukungan positif baik dari luar maupun dari dalam. Hal tersebut dapat terlihat ketika para orang tua yang mengizinkan bahkan mendukung anaknya untuk lebih giat lagi berlatih ketika ada *event*. Hal tersebut yang menjadi semangat ataupun motivasi dalam meraih prestasi dari pencak silat. Selain itu dari pihak pemerintah juga ikut mendukung terkait tentang prestasi pencak silat. Hal tersebut dapat terlihat ketika pemerintah memberikan kontribusi berupa pemberian sarana dan prasarana. Selain itu pemerintah juga memberikan *reward* berupa uang pembinaan bagi kontingen yang mendapatkan juara terbaik. Hal tersebut sangat membantu para pelatih untuk melatih atlet dan memberikan semangat kepada para atlet agar lebih giat berlatih.

4. Patologi Pemuda

Secara umum pemuda dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki umur dengan kisaran 16-30 tahun. Namun terdapat beberapa orang yang mengartikan pemuda merupakan seseorang yang masih memiliki tingkat emosi ataupun pengontrolan diri yang tidak stabil, sehingga tanpa disadari pemuda yang memiliki moral dan mental yang rendah akan mudah sekali melakukan suatu tindakan yang negatif dan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain ataupun lingkungan sekitar. Tindakan-tindakan negatif yang dilakukan pemuda tersebut biasa dikatakan sebagai patologi pemuda yang termasuk salah satu penyakit masyarakat.

Terjadinya patologi pemuda disebabkan oleh beberapa faktor seperti pergaulan bebas, keluarga yang rusak atau berantakan. Hal tersebut banyak terjadi di kalangan masyarakat baik menengah maupun atas. Setelah melakukan beberapa survey dan observasi peneliti menemukan titik terang terkait tentang pencegahan terjadinya patologi pemuda diantaranya yaitu dengan penanaman dan peneguhan jiwa terkait moralitas. Hal tersebut bisa ditempuh dengan jalan mengikuti salah satu perguruan pencak silat yang bernama PSHT.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pencak silat PSHT tidak mengajarkan bela diri saja melainkan juga mengajarkan penanaman moral atau biasa disebut sebagai ke-SH-an atau kerohanian. Dengan adanya pengajaran kerohanian akan membentengi atau mencegah seseorang yang belajar pencak silat PSHT agar tidak menyalahgunakan ilmu yang didapat.

Walaupun demikian terdapat kekhawatiran terkait pemuda atau pelajar yang sedang mendalami pencak silat karena beberapa pemikiran yang negatif. Namun dengan diperolehnya prestasi dari pencak silat akan mengubah pandangan masyarakat bahwa pencak silat tidak hanya belajar ilmu bela diri melainkan membantu orang yang mengikutinya mendapatkan pertahanan diri dan meraih prestasi khususnya untuk pelajar dan pemuda.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencak silat PSHT yang berada di tengah-tengah masyarakat dan berada di lingkungan sekolah serta dipedesaan dan kota sudah diterima dengan baik. Selain itu pihak sekolah juga mendukung dengan memfasilitasi sarana dan prasarana demi mengembangkan potensi siswanya melalui ilmu bela diri serta pihak wali murid juga mendukung sepenuhnya terkait kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Melihat potensi pemuda Kabupaten Banyuwangi yang beraneka ragam di bidang olahraga maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan dengan mengadakan *event* yang digelar setiap tahun yaitu PORKAB dengan tujuan menciptakan pemuda yang lebih unggul, produktif dan berprestasi. Hal tersebut merupakan tugas pemerintah yang diimplementasikan dalam Perbub Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga yang memiliki tujuan untuk melaksanakan pembinaan, penidikan, pengembangan sesuai dengan tupoksi DISPORA.

5. Implementasi Perbub Nomor 57 tahun 2016

Dalam menganalisis implementasi kebijakan Perbub Nomor 57 tahun 2016,

yang terkait dengan judul penelitian, maka peneliti menggunakan model implementasi yang diadopsi dari George Edward III, sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu unsur terpenting ketika menjangkan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh DISPORA dapat tersampaikan dengan cepat karena jaman sudah modern dan canggih, selain itu Pemkab Banyuwangi juga memikirkan terkait desa terpencil yang tidak bisa mengakses internet oleh karena itu dengan adanya Smart Kampung akan lebih memudahkan dalam menjalin komunikasi

Selain itu kejelasan informasi sudah baik dilihat dari format surat yang diedarkan kepada sasaran atau pihak-pihak sekolah sudah terlampir terkait alur pendaftaran selain itu juga dalam format surat tersebut juga dilaampirkan *reward* yang akan diberikan oleh pihak DISPORA.

Sehingga sudah dapat dipaastikan bahwa lembaga dalam memberi perintah sudah konsisten. Maka dalam menjalankan suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara sistematis oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait pemuda dan prestasi.

b. Sumberdaya

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumberdaya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik.

Maka dalam mengimplementasikan kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan SDM yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas SDM berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah SDM terkait cukup atau tidak melingkupi sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM DISPORA dapat dikatakan masih belum memadai karena tidak sesuai dengan keahlian dan profesionalitas serta kompetensi dibidangnya. Maka untuk menyikapi kejadian tersebut harus ada memiliki tenaga dan pikiran yang ekstra

ketika melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang terjadi akan lebih baik jika orang-orang yang membidangi sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Atau mungkin bisa menggunakan cara mengadakan pelatihan sesuai bidangnya agar lebih spesifik lagi. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar kegiatan yang akan dilakukan.

Namun dikarenakan unsur pelaksana sudah mendapat kewenangan yang jelas maka kegiatan yang dijalankan dapat terkoordinir dan berjalan dengan lancar. Hal tersebut dikarenakan para pelaksana bergerak sesuai dengan kewenangannya yang mendasar pada Perbub Nomor 57 tahun 2016. Oleh karena itu program yang dijalankan oleh DISPORA dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah tersusun. Selain itu bahwa kelengkapan terkait sarana dan prasarana yang diberikan oleh DISPORA dirasa sudah cukup baik.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor terpenting di dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Dari penelitian yang didapatkan sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan DISPORA dalam mengimplementasikan Perbub Nomor 57 tahun 2016 sudah baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengangkatan birokrasi tidak telalu terpacu kepada keahliannya karena minimnya SDM. Akan tetapi jika terdapat SDM yang bagus atau sesuai bidangnya tentu akan menjadi prioritas utama. Sehingga pengangkatan birokrasi pada DISPORA masih belum cukup jika pelaksana kebijakan bukan orang yang membidangnya. Hal tersebut dapat dilihat ketika DISPORA melaksanakan suatu kegiatan dengan mengambil beberapa orang yang membidangi untuk terlibat dalam menjadi panitia.

Sehingga terdapat teknik yang disarankan dalam mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan yaitu dengan olahraga rekreasi. Pegawai atau *staff* yang diberi mandat menjalankan atau

mendampingi kegiatan yang berhubungan dengan olahraga rekreasi tidak memiliki pemikiran atau tidak akan bisa melakukan suatu tindakan insetif. Karena dengan membuat para pegawai atau *staff* terjun langsung dilapangan sama halnya dengan memberikan mereka suatu kenyamanan karena mereka beranggapan seperti sedang liburan.

Sehingga, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yaitu dalam mengatasi insetif yang terjadi pada para pelaksana kebijakan yaitu dengan olahraga rekreasi yang memiliki arti penyegaran kembali badan dan pikiran serta hal tersebut merupakan sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan dan piknik. Sehingga dapat diartikan olahraga rekreasi merupakan suatu kegiatan menyenangkan yang mengandung unsur gerak positif serta termasuk dalam aktivitas *indoor* maupun *outdoor* yang didominasi unsur-unsur olahraga sehingga dapat menyenangkan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi unsur pelaksana kegiatan. Sehingga berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan SOP dalam DISPORA masih mungkin terjadi suatu kendala bagi implementasi kebijakan jika terjadinya suatu kegiatan yang dadakan apalagi jika pelaksana kebijakan masih baru yang mana dalam melaksanakan kegiatan masih membutuhkan cara-cara kerja yang lebih sederhana.

Namun untuk menghindari suatu tindakan negatif ataupun mencegah

terjadinya hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam suatu implementasi kebijakan DISPORA selalu bersinergi dengan instansi lain, seperti: KONI dan DISPENDIK.

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak terdapat kendala yang dialami selama DISPORA bersinergi dalam melaksanakan tugasnya. Namun kendala bisa terjadi jika berhubungan dengan anggaran. Dalam membuat kegiatan atau program DISPORA akan melihat anggaran yang ada, oleh karena itu program yang sudah diagendakan sudah disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Aktivitas PSHT Terhadap Pembinaan Prestasi Pemuda di Kabupaten Banyuwangi dapat ditarik 4 (empat) aspek kesimpulan, yaitu struktur birokrasi DISPORA dalam melakukan pembinaan terhadap atlet sudah baik dengan melibatkan KONI sebagai unsur pelaksana dalam pembinaan cabang olahraga yang lebih spesifik.

Aspek komunikasi yang diterapkan sudah baik karena sudah dapat diterima oleh masyarakat; aspek sumberdaya yang dimiliki staff masih kurang memenuhi karena profesionalitas sesuai bidang dapat mempengaruhi lancarnya suatu implementasi kebijakan; aspek disposisi dan SOP yang dijalankan sudah cukup dengan adanya konsistensi menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana, Deddy. (2011) **Ilmu Komunikasi**. Bandung, PT. Rosdakarya.
- Dayakisni, Tri dan Hudaniah. 2012. **Psikologi Sosial**. Malang: UMM Press.
- Kartono, Kartini. (2003). **Patologi Sosial 3. Gangguan-gangguan kejiwaan**. Jakarta, PT. RajaGrafindo.
- Trijono, Lambang. (2007) **Pembangunan Sebagai Perdamaian**. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Wiyono, Slamet. (2006) **Managemen Potensi Diri**. Jakarta: PT Grasindo.
- Nasution, Fitri Haryani dan Pasaribu, Febridani Santosa. (2017). **Buku Pintar Pencak Silat**. Jakarta, Anugrah.

- Soekanto, Soerjono dan Sulistyoadi, Budi. (2013) **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. (2014) **Ilmu Pemerintahan**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Mylsidayu, Apta dan Kurniawan, Febi. (2015) **Ilmu Kepeleatihan Dasar**. Bandung, Alfabeta.
- Mulyana. (2014) Pendidikan Pencak Silat. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, Utami. (2014) **Kreativitas dan Keberbakatan**. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agustino, Leo. (2008) **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung, Alfabeta
- Sugiyono. (2017) **Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. (2018) **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung, Alfabeta
- Syaikhudin, Ahmad. (2012) **Konsep Pendidikan Menurut Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantoro**. Cendekia, Vol 10.
- Shihab, Mohammad. (2017) **Startegi Public Relation dan Pencak Silat Tradisional**. Jisip, Vol 6.
- Prastyana, Brahmana Rangga. (2016) **Peran Extrakurikuler Pencak Silat Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja Di Sekolah**. Jurnal Buana Pendidikan, Vol 22.
- Winata, Andri Ridwan. (2015) **Evaluasi Program Pembinaan Prestasi Pencak Silat**. Jpes, Vol 6.
- Ernitaslim. (2017) **Implementasi Kebijakan Peningkatan Prestasi Atlet Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLDP) Dinas dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**. Katalogis, Vol 5.
- Septian, Windy Aswin. (2017) **Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Dalam Pembinaan Atlet di Kota Samarinda**. Ilmu Pemerintahan, Vol 5.
- Herman, Jon. (2015) **Manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga**. Manajer Pendidikan, Vol 9.
- Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
- UU RI Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- PP RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.